

STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG

Heri Budi Santoso *¹

¹ Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung

*e-mail: heri.budi1333@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi pariwisata Provinsi Lampung yang masih berada pada peringkat 24 dari 34 provinsi dalam Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional (IPKN) 2024. Posisi ini mencerminkan rendahnya daya saing Lampung meskipun memiliki potensi besar dari segi sumber daya alam, budaya, dan lokasi strategis. Tujuan utama penelitian adalah merumuskan strategi peningkatan daya saing pariwisata yang dapat diimplementasikan secara terukur, efektif, dan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis kebijakan berbasis 16 subpilar IPKN. Data penelitian diperoleh dari studi literatur, telaah dokumen kebijakan, serta data sekunder IPKN 2024, kemudian dianalisis secara tematik dengan menekankan pada hubungan antar subpilar yang memengaruhi daya saing daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa tantangan utama pariwisata Lampung meliputi infrastruktur layanan yang belum memenuhi standar internasional, rendahnya kualitas dan sertifikasi tenaga kerja, keterbatasan pemanfaatan teknologi digital, serta lemahnya penerapan standar kesehatan, higienis, dan keselamatan. Selain itu, pengelolaan budaya dan sumber daya alam belum optimal, investasi masih minim akibat birokrasi dan regulasi yang tidak mendukung, serta promosi pariwisata yang belum terintegrasi dengan baik. Dampaknya adalah rendahnya lama tinggal wisatawan, stagnasi jumlah kunjungan, dan kontribusi kecil terhadap perekonomian daerah. Pembahasan penelitian menekankan pentingnya revitalisasi infrastruktur, sertifikasi SDM, digitalisasi promosi, penerapan penuh standar CHSE, pengembangan pariwisata berbasis budaya, serta diversifikasi produk wisata seperti MICE dan ekowisata. Selain itu, model community-based tourism dipandang mampu memperkuat inklusi sosial dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Kesimpulannya, strategi peningkatan daya saing pariwisata Lampung harus dirancang secara terintegrasi dengan mengedepankan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Dengan pendekatan kebijakan yang komprehensif, Lampung berpotensi menjadi destinasi unggulan yang berdaya saing tinggi, inklusif, dan berkelanjutan di tingkat nasional maupun global.

Kata kunci: Daya Saing Pariwisata, Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional (IPKN), Infrastruktur Pariwisata, Community-Based Tourism, Keberlanjutan

Abstract

This study aims to analyze the condition of tourism in Lampung Province, which is currently ranked 24th out of 34 provinces in the 2024 National Tourism Development Index (IPKN). This position reflects Lampung's low competitiveness despite its considerable potential in natural resources, culture, and strategic location. The main objective of this research is to formulate strategies to enhance tourism competitiveness that can be implemented in a measurable, effective, and sustainable manner. The method employed is a qualitative descriptive approach using policy analysis based on 16 IPKN sub-pillars. Research data were obtained from literature studies, policy document reviews, and secondary data from the 2024 IPKN, then analyzed thematically by emphasizing the interrelation among sub-pillars that influence regional competitiveness. The analysis reveals that the main challenges of Lampung's tourism include service infrastructure that does not yet meet international standards, low quality and certification of the workforce, limited utilization of digital technology, and weak implementation of health, hygiene, and safety standards. Moreover, cultural and natural resource management remains suboptimal, investment is still limited due to bureaucracy and unsupportive regulations, and tourism promotion is poorly integrated. The impacts include short tourist length of stay, stagnant visitor numbers, and minimal contribution to the regional economy. The discussion highlights the importance of infrastructure revitalization, workforce certification, digital promotion, full implementation of CHSE standards, development of culture-based tourism, and diversification of tourism products such as MICE and ecotourism. Furthermore, the community-based tourism model is considered effective in strengthening social inclusion and delivering direct benefits to local communities. In conclusion, strategies to improve Lampung's tourism competitiveness must be designed in an integrated manner that prioritizes economic, social, cultural, and environmental aspects. With a comprehensive policy approach, Lampung has the potential

to become a highly competitive, inclusive, and sustainable tourism destination at both national and global levels.

Keywords: *Tourism Competitiveness, National Tourism Development Index (IPKN), Tourism Infrastructure, Community-Based Tourism, Sustainability*

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Di berbagai belahan dunia, pariwisata terbukti mampu menjadi motor penggerak perekonomian melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pengembangan infrastruktur yang lebih inklusif. Bagi Provinsi Lampung, pariwisata adalah sektor strategis yang menyimpan potensi besar melalui kekayaan alam, budaya, serta letak geografis yang dekat dengan pasar utama seperti Jakarta dan Sumatera Selatan.

Berdasarkan hasil Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN) 2024, Provinsi Lampung menempati peringkat 24 dari 34 provinsi yang dinilai. Posisi ini menunjukkan bahwa Lampung masih berada pada kategori menengah bawah dalam hal daya saing pariwisata. Artinya, berbagai aspek pembangunan pariwisata di Lampung belum optimal sehingga belum mampu menyaingi provinsi lain yang memiliki destinasi unggulan.

Tabel 1. Sebaran Skor Indeks dan Perbedaan Terhadap Nilai Nasional Tahun 2024

PROVINSI	2024 SCORE	2024 RANK	Score Diff. National 2024
BALI	5.39	1	33.88%
DKI JAKARTA	4.99	2	24.00%
DI YOGYAKARTA	4.87	3	21.05%
KALIMANTAN TIMUR	4.54	4	12.73%
JAWA TENGAH	4.51	5	11.31%
JAWA TIMUR	4.48	6	11.22%
KEP. RIAU	4.39	7	9.12%
SULAWESI SELATAN	4.35	8	8.10%
BANTEN	4.21	9	4.64%
KEP. BANGKA BELITUNG	4.18	10	3.92%
SUMATERA UTARA	4.17	11	+3.50%
SUMATERA BARAT	4.14	12	+2.82%
KALIMANTAN UTARA	4.13	13	+2.45%
SULAWESI UTARA	4.03	14	+0.15%
KALIMANTAN SELATAN	3.97	15	-1.36%
NUSA TENGGARA TIMUR	3.96	16	-1.55%
GORONTALO	3.94	17	-2.15%
NUSA TENGGARA BARAT	3.93	18	-2.38%
SULAWESI TENGGARA	3.87	19	-3.81%
ACEH	3.87	20	-3.82%
JAWA BARAT	3.85	21	-4.34%
RIAU	3.84	22	-4.67%
KALIMANTAN TENGAH	3.82	23	-5.03%
LAMPUNG	3.78	24	-6.10%
BENGKULU	3.75	25	-6.77%
KALIMANTAN BARAT	3.73	26	-7.35%
SUMATERA SELATAN	3.72	27	-7.50%
JAMBI	3.67	28	-8.86%
SULAWESI TENGAH	3.54	29	-12.12%

PAPUA	3.54	30	-12.16%
MALUKU	3.53	31	-12.37%
PAPUA BARAT	3.46	32	-14.06%
MALUKU UTARA	3.42	33	-15.11%
SULAWESI BARAT	3.33	34	-17.39%

Sumber: Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional (IPKN) (2024)

Rendahnya peringkat daya saing pariwisata Lampung tidak lepas dari berbagai faktor, mulai dari infrastruktur layanan yang belum memadai, kualitas sumber daya manusia pariwisata yang rendah, hingga minimnya adopsi teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung promosi serta pengelolaan destinasi. Selain itu, isu kebersihan, higienis, keselamatan, dan keamanan destinasi wisata masih menjadi perhatian penting bagi wisatawan.

Kondisi tersebut berdampak negatif pada tingkat kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Walaupun Lampung memiliki atraksi unggulan seperti Taman Nasional Way Kambas, Pantai Pesisir Barat, serta wisata budaya dan kuliner, jumlah wisatawan yang berkunjung relatif stagnan dalam lima tahun terakhir. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Lampung masih relatif kecil dibanding potensi yang ada, menunjukkan bahwa sektor ini belum menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak lainnya adalah rendahnya lama tinggal wisatawan (*length of stay*) yang rata-rata hanya 1–2 hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa daya tarik dan layanan wisata belum cukup untuk membuat wisatawan memperpanjang kunjungannya. Akibatnya, multiplier effect pariwisata terhadap perekonomian lokal menjadi terbatas.

Selain itu, pandemi COVID-19 memberikan tekanan besar terhadap industri pariwisata Lampung. Walaupun sektor ini mulai bangkit pada tahun 2022–2023, pemulihan belum sepenuhnya merata. Banyak pelaku usaha pariwisata skala kecil dan menengah masih menghadapi kesulitan, baik dari sisi permodalan maupun daya beli masyarakat. Di sisi lain, tren pariwisata global mengalami perubahan. Wisatawan kini semakin memperhatikan aspek keberlanjutan, higienitas, keselamatan, serta penggunaan teknologi digital dalam merencanakan perjalanan. Jika Lampung tidak mampu menyesuaikan diri dengan tren ini, maka daya saingnya akan semakin tertinggal dibanding provinsi lain. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang terintegrasi untuk meningkatkan daya saing pariwisata Lampung. Strategi ini harus berbasis pada indikator yang jelas, seperti IPKN, agar kebijakan yang diambil dapat terukur dan tepat sasaran. Pendekatan berbasis data dan bukti ilmiah sangat penting untuk mengidentifikasi kelemahan serta merumuskan solusi yang efektif.

Artikel ini disusun untuk memberikan analisis komprehensif mengenai kondisi pariwisata Lampung berdasarkan 16 subpilar IPKN 2024, sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan yang implementatif. Harapannya, strategi yang dirumuskan dapat mendorong peningkatan daya saing pariwisata Lampung, meningkatkan jumlah wisatawan, memperpanjang lama tinggal, serta mendorong pengeluaran wisatawan yang lebih tinggi demi kesejahteraan masyarakat daerah.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini disusun untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi pariwisata di Provinsi Lampung dengan mengacu pada kerangka Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional (IPKN) 2024 yang terdiri dari 16 subpilar. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis kebijakan. Subjek penelitian mencakup sektor pariwisata di Lampung yang melibatkan aktor-aktor utama, baik pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, komunitas lokal, maupun wisatawan. Data penelitian dikumpulkan melalui studi dokumen, telaah literatur, laporan resmi pemerintah, serta data sekunder dari hasil pengukuran IPKN 2024. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menelaah hasil indeks, kemudian mengidentifikasi posisi Lampung dibandingkan provinsi lain, serta menguraikan faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya peringkat daya saing.

Analisis difokuskan pada dimensi infrastruktur, sumber daya manusia, kesiapan teknologi informasi, kesehatan dan higienis, budaya dan non-rekreasi, harga, serta aspek lingkungan dan

regulasi. Metode analisis kebijakan yang digunakan meliputi identifikasi masalah utama, penelusuran penyebab melalui masing-masing subpilar, perumusan alternatif solusi yang relevan, serta analisis dampak positif dan negatif dari setiap opsi kebijakan. Selanjutnya, strategi prioritas ditentukan dengan mempertimbangkan efektivitas implementasi, kesesuaian dengan tren global pariwisata, serta kontribusinya terhadap peningkatan daya saing daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Kebijakan

Infrastruktur layanan pariwisata di Lampung masih menghadapi tantangan besar. Banyak destinasi wisata yang belum memiliki fasilitas standar seperti pusat informasi wisata, toilet higienis, akomodasi berkualitas, serta aksesibilitas yang baik. Hal ini berpengaruh pada kepuasan wisatawan yang cenderung menilai pengalaman wisata di Lampung masih kurang memadai dibanding provinsi lain.

Sumber daya manusia dan pasar tenaga kerja pariwisata Lampung juga masih rendah kualitasnya. Lulusan sekolah pariwisata yang tersertifikasi terbatas jumlahnya, sementara tenaga kerja yang bekerja di sektor pariwisata sebagian besar belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan standar industri global. Akibatnya, pelayanan wisata masih jauh dari kata prima.

Dari sisi kesiapan teknologi, informasi, dan komunikasi, Lampung juga belum maksimal. Digitalisasi promosi wisata masih sporadis, banyak pelaku usaha pariwisata belum mampu memanfaatkan platform digital secara optimal. Padahal, wisatawan saat ini sangat bergantung pada teknologi untuk mencari informasi, memesan layanan, serta memberikan ulasan.

Aspek kesehatan, higienis, dan keselamatan juga masih menjadi tantangan. Banyak destinasi wisata yang belum memenuhi standar kebersihan internasional. Selain itu, ketersediaan fasilitas kesehatan darurat di lokasi wisata juga terbatas. Hal ini menurunkan kepercayaan wisatawan, terutama mancanegara, untuk menjadikan Lampung sebagai destinasi utama.

Sumber daya budaya dan alam Lampung sebenarnya sangat kaya. Lampung memiliki warisan budaya, seni, dan tradisi yang unik, serta keindahan alam mulai dari pantai, gunung, hingga taman nasional. Namun, kekayaan ini belum dikelola dengan baik sehingga nilai ekonominya belum optimal.

Sementara itu, kebijakan yang ada, baik di tingkat nasional melalui RPJMN maupun di tingkat daerah melalui RPJMD, telah menempatkan pariwisata sebagai salah satu prioritas pembangunan. Namun, implementasi di lapangan seringkali terhambat oleh keterbatasan anggaran, koordinasi antarinstansi, serta rendahnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam mendukung pembangunan pariwisata.

Dari sisi investasi dan pembiayaan, sektor pariwisata di Lampung masih menghadapi keterbatasan dukungan. Investor cenderung menilai tingkat risiko tinggi karena rendahnya kepastian hukum, infrastruktur dasar yang belum memadai, serta kurangnya insentif yang menarik. Akibatnya, pembangunan destinasi unggulan maupun fasilitas pendukung pariwisata berjalan lambat, dan ketergantungan pada APBD/APBN masih sangat besar.

Tata kelola kelembagaan pariwisata di Lampung juga memerlukan penguatan. Koordinasi antarinstansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, masih lemah sehingga program yang dijalankan cenderung tumpang tindih dan tidak berkesinambungan. Selain itu, keterlibatan asosiasi pariwisata, akademisi, serta komunitas lokal dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan masih terbatas, sehingga aspirasi masyarakat tidak sepenuhnya terakomodasi.

Dari perspektif keberlanjutan lingkungan, pariwisata Lampung juga menghadapi ancaman serius. Beberapa destinasi pantai, laut, dan pegunungan mengalami degradasi akibat aktivitas wisata yang tidak terkendali. Minimnya regulasi pengelolaan sampah dan konservasi membuat daya tarik alam berpotensi menurun. Jika tidak ditangani, kerusakan lingkungan ini dapat mengurangi nilai jual destinasi sekaligus mengancam kelangsungan ekosistem jangka panjang.

Tingkat keterhubungan Lampung dengan pasar wisata nasional maupun internasional sebenarnya cukup potensial mengingat posisinya yang strategis di pintu gerbang Sumatera. Namun, branding pariwisata Lampung belum kuat dan kalah bersaing dengan provinsi lain seperti Bali, Yogyakarta, atau Sumatera Barat. Promosi masih bersifat parsial, tidak terintegrasi, dan kurang menekankan pada diferensiasi produk wisata khas Lampung yang sebenarnya bisa menjadi daya tarik unik.

Secara umum, tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa pariwisata Lampung masih berada pada tahap berkembang dan memerlukan strategi percepatan. Kebijakan pengembangan pariwisata tidak hanya harus berfokus pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga pada kualitas pengalaman, pemerataan manfaat ekonomi, serta keberlanjutan. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, pariwisata Lampung dapat menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus penguat identitas budaya bangsa.

Analisis Kebijakan Identifikasi Masalah

Secara umum, daya saing pariwisata Provinsi Lampung masih rendah dengan peringkat 24 dari 34 provinsi pada Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN) 2024. Posisi ini menunjukkan bahwa meskipun Lampung memiliki potensi besar di sektor pariwisata, keunggulan kompetitifnya masih tertinggal dibanding provinsi lain. Masalah utama terkait aksesibilitas, kualitas layanan, kesiapan SDM, teknologi, keberlanjutan lingkungan, serta promosi.

Analisis Penyebab (per subpilar)

1. **Infrastruktur Layanan Pariwisata:** Fasilitas dasar (toilet, pusat informasi, akomodasi, area parkir) masih terbatas dan belum memenuhi standar internasional.
2. **SDM & Pasar Tenaga Kerja:** Mayoritas tenaga kerja belum tersertifikasi, keterampilan hospitality rendah, serta mismatch antara kebutuhan industri dan kompetensi lulusan.
3. **Kesiapan Teknologi Informasi & Komunikasi:** Literasi digital pelaku pariwisata masih rendah, jaringan internet di destinasi terbatas, pemanfaatan big data dan aplikasi terpadu minim.
4. **Kesehatan & Higienis:** Penerapan standar CHSE belum merata, fasilitas sanitasi dan layanan kesehatan darurat minim.
5. **Sumber Daya Budaya:** Warisan budaya (tari, kuliner, kerajinan, festival) belum diintegrasikan secara optimal ke dalam produk wisata unggulan.
6. **Sumber Daya Non Rekreasi:** Potensi *MICE*, *sport tourism*, *edu-tourism* belum tergarap maksimal.
7. **Dampak & Tekanan Permintaan Wisata:** Infrastruktur belum mampu menampung lonjakan kunjungan saat *peak season*, menimbulkan *over-crowding* dan tekanan lingkungan.
8. **Ketahanan & Kondisi Sosioekonomi:** Ketergantungan masyarakat pada pariwisata masih rendah, kontribusi PDRB sektor pariwisata kecil, ekonomi kreatif belum sepenuhnya terintegrasi.
9. **Daya Saing Harga:** Biaya transportasi dan akomodasi relatif tinggi, sementara daya beli wisatawan masih terbatas.
10. **Prioritas Pembangunan Kepariwisataan:** Pariwisata belum sepenuhnya jadi sektor prioritas dalam pembangunan daerah, alokasi anggaran masih minim.
11. **Infrastruktur Darat & Pelabuhan:** Akses jalan menuju destinasi banyak yang rusak, keterhubungan antar-destinasi kurang, pelabuhan wisata belum optimal.
12. **Lingkungan Bisnis:** Investasi pariwisata rendah karena regulasi birokrasi rumit dan minimnya insentif fiskal.
13. **Infrastruktur Transportasi Udara:** Bandara Radin Inten II belum maksimal melayani penerbangan internasional, rute domestik terbatas.
14. **Keselamatan & Keamanan:** Kesadaran wisata aman masih rendah, standar keselamatan transportasi wisata belum konsisten.
15. **Keberlanjutan Lingkungan:** Sampah di destinasi wisata meningkat, kesadaran wisata berkelanjutan rendah, konservasi alam lemah.
16. **Sumber Daya Alam:** Potensi bahari, hutan, danau, dan taman nasional besar, tetapi promosi dan pengelolaan masih minim.

Alternatif Solusi (per subpilar, ringkas)

1. **Revitalisasi Infrastruktur Layanan Dasar Berbasis Standar Internasional.**
Peningkatan infrastruktur layanan dasar seperti sanitasi, listrik, air bersih, jalan, transportasi umum, dan jaringan internet harus dilakukan secara terintegrasi agar sesuai dengan standar internasional. Hal ini penting untuk memberikan kenyamanan, keselamatan, dan pengalaman terbaik bagi wisatawan, sekaligus meningkatkan daya saing Lampung di pasar global.
2. **Sertifikasi Kompetensi SDM dan Pelatihan Hospitality**
SDM pariwisata perlu dibekali dengan sertifikasi kompetensi yang diakui, baik nasional maupun internasional, serta pelatihan berkelanjutan di bidang hospitality. Tenaga kerja dengan kemampuan bahasa asing, etika layanan, dan pemahaman budaya akan meningkatkan kualitas pelayanan dan citra destinasi.
3. **Digitalisasi Promosi dan Big Data Pariwisata**
Pemanfaatan teknologi digital untuk promosi pariwisata harus diperluas melalui kampanye media sosial, website interaktif, dan aplikasi mobile. Selain itu, penerapan big data untuk memantau tren kunjungan, preferensi wisatawan, serta pola perjalanan akan mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
4. **Implementasi Penuh Standar CHSE**
Penerapan standar *Cleanliness, Health, Safety, and Environment (CHSE)* pada hotel, restoran, transportasi, dan destinasi wisata merupakan keharusan agar wisatawan merasa aman dan nyaman. Standar ini juga membantu meningkatkan kepercayaan internasional terhadap Lampung sebagai destinasi wisata sehat dan ramah lingkungan.
5. **Integrasi Budaya Lokal ke dalam Paket Wisata Unggulan**
Seni tradisi, kuliner khas, tarian, musik, dan ritual budaya lokal perlu dikemas menjadi paket wisata unggulan. Hal ini tidak hanya melestarikan warisan budaya Lampung, tetapi juga memberikan pengalaman otentik yang berbeda bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.
6. **Pengembangan MICE, Sport Tourism, dan Ekowisata**
Diversifikasi produk wisata melalui pengembangan *MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition)*, *sport tourism* (wisata berbasis olahraga), serta ekowisata berbasis konservasi dapat memperluas segmen pasar wisatawan. Langkah ini juga mendorong perputaran ekonomi di luar wisata rekreasi.
7. **Manajemen Kapasitas Destinasi dengan Sistem Booking Online**
Untuk menghindari overtourism, perlu diterapkan sistem manajemen kapasitas berbasis teknologi, seperti reservasi *online*, pengaturan kuota kunjungan, dan monitoring jumlah pengunjung *real-time*. Hal ini menjaga keberlanjutan destinasi sekaligus meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan.
8. **Diversifikasi Ekonomi Berbasis Pariwisata & Komunitas/Pelaku Kreatif**
Pariwisata harus menjadi penggerak ekonomi kreatif dengan menghubungkan produk lokal seperti kuliner, kriya, dan fesyen ke pasar wisata. Dengan demikian, manfaat ekonomi dari sektor pariwisata dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi kreatif.
9. **Regulasi Harga Transportasi & Akomodasi yang Lebih Kompetitif**
Daya saing Lampung dapat ditingkatkan dengan pengaturan harga transportasi, tiket, dan akomodasi yang lebih kompetitif. Regulasi tarif yang transparan dan seimbang akan membuat wisatawan lebih tertarik, tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
10. **Menetapkan Pariwisata sebagai Sektor Prioritas Pembangunan**
Pariwisata harus ditetapkan sebagai sektor prioritas dalam kebijakan pembangunan daerah dengan dukungan anggaran, regulasi lintas sektor, dan program strategis. Hal ini akan memastikan keberlanjutan pengembangan destinasi serta konsistensi arah pembangunan jangka panjang.
11. **Peningkatan Kualitas Jalan dan Modernisasi Pelabuhan**

Aksesibilitas merupakan kunci pariwisata. Oleh karena itu, pembangunan jalan menuju destinasi, perbaikan infrastruktur darat, serta modernisasi pelabuhan penyeberangan harus dipercepat. Dengan konektivitas yang baik, mobilitas wisatawan akan semakin lancar dan nyaman.

12. Penyederhanaan Regulasi Investasi & Pemberian Insentif Fiskal

Untuk mendorong investasi pariwisata, regulasi harus disederhanakan dan proses perizinan dipercepat. Pemerintah juga dapat memberikan insentif fiskal berupa keringanan pajak, subsidi, atau kemudahan pembiayaan bagi investor yang berkomitmen mengembangkan pariwisata berkelanjutan.

13. Pengembangan Rute Penerbangan Domestik & Internasional

Peningkatan akses udara sangat penting, terutama dengan membuka rute penerbangan langsung dari kota-kota besar di Indonesia maupun mancanegara ke Lampung. Langkah ini akan meningkatkan jumlah kunjungan sekaligus memperluas pasar wisatawan.

14. Peningkatan Standar Keselamatan Wisata melalui SOP & Edukasi

Keselamatan wisatawan adalah prioritas utama. Oleh karena itu, destinasi wisata harus memiliki SOP keselamatan, pemandu wisata yang terlatih, serta sistem evakuasi darurat. Edukasi kepada wisatawan juga penting untuk mencegah risiko insiden.

15. Penerapan Pariwisata Hijau & Pengelolaan Sampah Berbasis 3R

Pariwisata berkelanjutan perlu diwujudkan melalui konservasi energi, penggunaan energi terbarukan, serta pengelolaan sampah dengan prinsip *Reduce, Reuse, Recycle (3R)*. Hal ini mendukung citra Lampung sebagai destinasi ramah lingkungan.

16. Promosi Ekowisata Berbasis Sumber Daya Alam Unggulan

Potensi alam Lampung seperti pantai, gunung, taman nasional, dan hutan mangrove harus dipromosikan sebagai produk ekowisata unggulan. Dengan strategi promosi yang tepat, ekowisata dapat menjadi daya tarik utama sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Analisis Dampak

1. Infrastruktur Layanan Pariwisata

Peningkatan infrastruktur layanan pariwisata akan memberikan dampak positif berupa meningkatnya kenyamanan, aksesibilitas, dan kualitas pengalaman wisatawan, sehingga dapat memperpanjang lama tinggal dan meningkatkan pengeluaran wisata. Namun, dampak negatif yang mungkin muncul adalah beban biaya pembangunan yang tinggi bagi daerah serta potensi ketidakmerataan pembangunan antarwilayah, sehingga perlu diimbangi dengan perencanaan yang adil dan berkelanjutan.

2. Sumber Daya Manusia dan Pasar Tenaga Kerja

Penguatan kapasitas SDM pariwisata akan berdampak positif pada profesionalisme tenaga kerja, peningkatan daya saing global, serta membuka lapangan kerja baru. Dampak negatif yang mungkin timbul adalah risiko ketidaksesuaian antara keterampilan yang dilatih dengan kebutuhan pasar, serta terjadinya brain drain ketika tenaga kerja terampil lebih memilih keluar daerah.

3. Kesiapan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi

Penerapan teknologi digital akan memperluas promosi, memperkuat sistem reservasi online, dan meningkatkan citra destinasi Lampung. Namun, dampak negatifnya adalah ketimpangan digital, terutama di wilayah pedesaan, serta meningkatnya ketergantungan pada teknologi asing yang dapat mengurangi kemandirian digital daerah.

4. Kesehatan dan Higienis

Peningkatan standar kesehatan dan higienis destinasi memberikan dampak positif berupa meningkatnya kepercayaan wisatawan, khususnya pasca pandemi, serta reputasi sebagai destinasi yang aman. Dampak negatif yang mungkin muncul adalah biaya operasional tambahan bagi pengelola destinasi kecil atau UMKM yang bisa menurunkan daya saing mereka jika tidak mendapat dukungan subsidi.

5. Sumber Daya Budaya

Pengembangan sumber daya budaya sebagai daya tarik wisata dapat meningkatkan identitas lokal, pelestarian tradisi, dan ekonomi kreatif berbasis budaya. Namun, jika tidak dikelola

- dengan bijak, dapat terjadi komodifikasi budaya yang mengurangi nilai otentik serta menimbulkan resistensi dari masyarakat adat atau pelaku budaya lokal.
6. Sumber Daya Non-Rekreasi
Optimalisasi sumber daya non-rekreasi seperti MICE (Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition) akan berdampak positif pada peningkatan wisata minat khusus dan perputaran ekonomi. Dampak negatifnya adalah potensi pencemaran lingkungan akibat pembangunan fasilitas besar serta ketergantungan pada event musiman yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi global.
 7. Dampak dan Tekanan Permintaan Kepariwisata
Meningkatnya permintaan wisata dapat berdampak positif pada peningkatan PAD, lapangan kerja, dan investasi. Namun, dampak negatif yang perlu diantisipasi adalah *overtourism* yang bisa merusak lingkungan, menurunkan kualitas pengalaman wisatawan, serta menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat lokal.
 8. Ketahanan dan Kondisi Sosioekonomi
Kebijakan yang memperkuat pariwisata berbasis masyarakat akan memberikan dampak positif berupa pemerataan ekonomi, pengurangan kemiskinan, serta memperkuat ketahanan sosial. Namun, dampak negatif yang dapat terjadi adalah munculnya kesenjangan jika hanya kelompok tertentu yang menikmati manfaat, sehingga berpotensi memicu konflik horizontal.
 9. Daya Saing Harga
Strategi menjaga daya saing harga melalui insentif atau regulasi pajak akan memberikan dampak positif berupa meningkatnya keterjangkauan destinasi bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun, dampak negatifnya adalah potensi penurunan penerimaan pajak daerah serta risiko menurunkan kualitas layanan akibat tekanan efisiensi biaya.
 10. Prioritas Pembangunan Kepariwisata
Penetapan prioritas pembangunan pariwisata akan berdampak positif dengan menciptakan fokus pengembangan destinasi unggulan serta penggunaan sumber daya yang lebih efektif. Dampak negatifnya adalah terpinggirkannya destinasi kecil atau desa wisata yang berpotensi berkembang namun kurang mendapat perhatian dan dukungan.
 11. Infrastruktur Darat dan Pelabuhan
Perbaikan infrastruktur darat dan pelabuhan akan memperlancar konektivitas antar destinasi, mendukung logistik, dan meningkatkan arus wisatawan. Namun, dampak negatif yang mungkin muncul adalah konversi lahan, kerusakan ekosistem pesisir, serta konflik dengan masyarakat lokal terkait penggusuran lahan.
 12. Lingkungan Bisnis
Penciptaan lingkungan bisnis yang kondusif akan meningkatkan investasi dan membuka peluang usaha baru di sektor pariwisata. Dampak negatifnya adalah potensi dominasi investor besar yang dapat meminggirkan pelaku usaha kecil lokal jika tidak ada perlindungan kebijakan afirmatif.
 13. Infrastruktur Transportasi Udara
Peningkatan layanan transportasi udara akan berdampak positif pada keterhubungan Lampung dengan pasar wisata nasional dan internasional. Dampak negatifnya adalah biaya pembangunan dan operasional yang tinggi, potensi ketergantungan pada maskapai tertentu, serta meningkatnya emisi karbon dari transportasi udara.
 14. Keselamatan dan Keamanan
Penguatan aspek keselamatan dan keamanan akan memberikan dampak positif berupa meningkatnya rasa aman wisatawan, menurunnya risiko kriminalitas, dan meningkatnya citra destinasi. Namun, dampak negatifnya adalah meningkatnya biaya pengawasan, serta potensi overregulasi yang bisa mengurangi kenyamanan wisatawan.
 15. Keberlanjutan Lingkungan
Implementasi pariwisata berkelanjutan akan memberikan dampak positif berupa pelestarian alam, pengurangan jejak karbon, dan kesinambungan daya tarik destinasi. Namun, dampak

negatifnya adalah meningkatnya biaya pengelolaan lingkungan serta resistensi dari pelaku usaha yang merasa terbebani dengan aturan ramah lingkungan.

16. Sumber Daya Alam

Pemanfaatan sumber daya alam sebagai daya tarik wisata akan meningkatkan diversifikasi produk pariwisata serta memperkuat daya tarik destinasi. Namun, dampak negatifnya adalah risiko eksploitasi berlebihan, degradasi ekosistem, dan kerentanan terhadap bencana jika tidak disertai dengan regulasi pengelolaan yang ketat.

a) Positif:

- 1) Aksesibilitas meningkat → jumlah kunjungan wisatawan naik.
- 2) SDM tersertifikasi → layanan lebih profesional.
- 3) Digitalisasi → promosi lebih luas & data wisatawan lebih akurat.
- 4) Penerapan CHSE → destinasi lebih aman & higienis.
- 5) Pariwisata berbasis budaya → nilai tambah ekonomi lokal.
- 6) Diversifikasi wisata → memperluas pasar dan mengurangi ketergantungan pada satu segmen.
- 7) Investasi meningkat → multiplier effect bagi ekonomi daerah.
- 8) Lingkungan lebih terjaga → pariwisata berkelanjutan terwujud.

b) Negatif/Potensi Risiko:

- 1) Biaya pembangunan infrastruktur tinggi → butuh dukungan APBN dan investasi swasta.
- 2) Risiko homogenisasi budaya jika tidak dikelola dengan bijak.
- 3) Digitalisasi bisa memunculkan kesenjangan bagi pelaku pariwisata kecil.
- 4) Regulasi harga transportasi berpotensi memicu resistensi pelaku usaha.
- 5) Pengembangan destinasi baru berpotensi menimbulkan tekanan ekologis jika tanpa perencanaan matang.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis masalah, penyebab, alternatif solusi, serta dampak pada masing-masing subpilar Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional (IPKN), rekomendasi kebijakan ini diarahkan untuk memilih solusi terbaik yang dapat diimplementasikan secara terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan. Tujuan utama rekomendasi adalah meningkatkan daya saing pariwisata daerah dengan tetap menjaga keseimbangan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

1. Infrastruktur Layanan Pariwisata

Solusi terbaik: Pembangunan infrastruktur layanan berbasis standar internasional dan ramah lingkungan.

Implementasi: Menyusun masterplan infrastruktur destinasi prioritas, memperkuat kemitraan dengan BUMN/BUMD, dan menyiapkan skema pembiayaan kreatif (KPBU, CSR).

2. Sumber Daya Manusia dan Pasar Tenaga Kerja

Solusi terbaik: Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan vokasional, sertifikasi kompetensi, dan link & match dengan industri.

Implementasi: Program pelatihan terpadu berbasis kompetensi, kerja sama dengan perguruan tinggi pariwisata, serta insentif bagi industri yang menyerap tenaga kerja bersertifikat.

3. Kesiapan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi

Solusi terbaik: Digitalisasi ekosistem pariwisata dan promosi berbasis big data.

Implementasi: Pengembangan platform digital pariwisata, integrasi sistem reservasi, serta pelatihan literasi digital untuk pelaku ekonomi kreatif.

4. Kesehatan dan Higienis

Solusi terbaik: Standarisasi protokol kesehatan di destinasi wisata.

Implementasi: Penyusunan SOP kesehatan berbasis *CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environment)*, fasilitasi sertifikasi bagi destinasi wisata.

5. Sumber Daya Budaya

- Solusi terbaik: Pengembangan wisata berbasis budaya dengan prinsip pelestarian.
Implementasi: Revitalisasi seni dan tradisi lokal, fasilitasi festival budaya berkelas nasional/internasional, dan penguatan HKI budaya agar tidak dikomodifikasi berlebihan.
6. Sumber Daya Non-Rekreasi
Solusi terbaik: Optimalisasi *MICE* dan pariwisata minat khusus berbasis kearifan lokal.
Implementasi: Pengembangan pusat konvensi di destinasi unggulan, promosi wisata olahraga dan edukasi, serta penguatan jejaring event.
 7. Dampak dan Tekanan Permintaan Kepariwisataaan
Solusi terbaik: Pengelolaan permintaan wisata secara berkelanjutan.
Implementasi: Penerapan kuota kunjungan di destinasi sensitif, pengembangan destinasi wisata alternatif untuk mengurangi *overtourism*, serta *monitoring real-time* jumlah wisatawan.
 8. Ketahanan dan Kondisi Sosioekonomi
Solusi terbaik: Penguatan pariwisata berbasis masyarakat (*community-based tourism*).
Implementasi: Pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), penguatan BUMDes, serta program inklusi sosial bagi kelompok rentan dalam ekosistem pariwisata.
 9. Daya Saing Harga
Solusi terbaik: Kebijakan harga kompetitif dengan menjaga kualitas layanan.
Implementasi: Subsidi biaya transportasi strategis, penurunan tarif pajak hiburan tertentu, serta insentif fiskal bagi hotel dan restoran yang menjaga kualitas layanan dengan harga bersaing.
 10. Prioritas Pembangunan Kepariwisataaan
Solusi terbaik: Penetapan klaster destinasi wisata prioritas berbasis potensi unggulan.
Implementasi: Penentuan 3-5 destinasi wisata unggulan per wilayah, fokus anggaran pembangunan infrastruktur dasar, serta branding terintegrasi antar destinasi.
 11. Infrastruktur Darat dan Pelabuhan
Solusi terbaik: Modernisasi infrastruktur darat dan pelabuhan berbasis konektivitas regional.
Implementasi: Peningkatan akses jalan menuju destinasi wisata prioritas, revitalisasi pelabuhan wisata, serta integrasi dengan transportasi darat-laut.
 12. Lingkungan Bisnis
Solusi terbaik: Penciptaan iklim usaha kondusif bagi investor dan komunitas/pelaku ekonomi kreatif lokal.
Implementasi: Penyederhanaan perizinan, insentif fiskal untuk investasi hijau, dan regulasi afirmatif bagi komunitas/pelaku ekonomi kreatif lokal agar tidak kalah bersaing dengan investor besar.
 13. Infrastruktur Transportasi Udara
Solusi terbaik: Penguatan transportasi udara yang terjangkau dan ramah lingkungan.
Implementasi: Penambahan rute penerbangan domestik dan internasional, insentif *landing fee* bagi maskapai, serta investasi pada bandara ramah lingkungan.
 14. Keselamatan dan Keamanan
Solusi terbaik: Sistem keamanan pariwisata berbasis teknologi dan partisipasi masyarakat.
Implementasi: Pemasangan *CCTV* di destinasi wisata prioritas, pelatihan balawisata, serta kerja sama dengan kepolisian dan masyarakat lokal untuk menjaga keamanan.
 15. Keberlanjutan Lingkungan
Solusi terbaik: Implementasi pariwisata hijau (*green tourism*).
Implementasi: Pengembangan destinasi berbasis konservasi, penerapan standar *eco-hotel*, serta regulasi pengelolaan sampah dan energi terbarukan di destinasi wisata.
 16. Sumber Daya Alam
Solusi terbaik: Pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip konservasi.
Implementasi: Penetapan *carrying capacity* tiap destinasi alam, program ekowisata berbasis masyarakat, serta pengawasan ketat terhadap eksploitasi Sumber Daya Alam yang berlebihan.

KESIMPULAN

Pariwisata nasional memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi, pencipta lapangan kerja, dan diplomasi budaya. Namun, analisis IPKN menunjukkan adanya kesenjangan besar antara potensi dan pemanfaatan pariwisata, terutama terkait infrastruktur, SDM, aksesibilitas, teknologi, dan keberlanjutan lingkungan. Hambatan ini saling berkaitan dan diperparah oleh lemahnya regulasi, pembiayaan, serta koordinasi antar lembaga.

Alternatif solusi yang ditawarkan mencakup pembangunan infrastruktur hijau, peningkatan kompetensi SDM, digitalisasi ekosistem pariwisata, *community-based tourism*, dan pelestarian budaya serta lingkungan. Dampak positif seperti konektivitas, perluasan pasar, dan penguatan ekonomi lokal perlu diimbangi dengan mitigasi risiko seperti tekanan lingkungan, kesenjangan digital, dan komodifikasi budaya.

Rekomendasi kebijakan menekankan integrasi 16 subpilar IPKN dengan fokus pada infrastruktur modern, sertifikasi SDM, digitalisasi promosi dan layanan, pariwisata hijau, serta pengembangan destinasi unggulan berbasis kluster. Selain itu, pendekatan berbasis masyarakat melalui BUMDes wisata dan kelompok sadar wisata diyakini mampu memperkuat inklusi sosial dan keberlanjutan.

Kesimpulannya, pembangunan pariwisata nasional harus dilaksanakan secara terintegrasi, adaptif, dan kolaboratif lintas sektor. Dengan strategi ini, pariwisata Indonesia berpotensi menjadi sektor unggulan yang berdaya saing global, inklusif, berkelanjutan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat serta perekonomian nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Kepariwisata Indonesia 2024*. Jakarta: BPS RI.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Kepariwisata Indonesia 2024*. Bandar Lampung: BPS Provinsi Lampung.
- Cooper, C., Fletcher, J., Fyall, A., Gilbert, D., & Wanhill, S. (2018). *Tourism: Principles and Practice (6th Edition)*. Harlow: Pearson Education Limited.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2024). *Laporan Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional (IPKN) 2024*. Jakarta: Kemenparekraf RI.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2020). *Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020–2024*. Jakarta: Kemenparekraf RI.
- Pitana, I. G., & Diarta, I. K. S. (2017). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11.
- Republik Indonesia. (2011). Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010–2025. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125.
- UNWTO. (2020). *International Tourism Highlights: 2020 Edition*. Madrid: World Tourism Organization.
- World Economic Forum. (2021). *Travel & Tourism Development Index 2021*. Geneva: WEF.
- Yoeti, O. A. (2016). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa.